

TESIS

**PENGARUH KREDIT PRODUKTIF SEKTOR EKONOMI
PRIORITAS DAN KREDIT KONSUMTIF TERHADAP
PENGANGGURAN DI SULAWESI SELATAN**

**THE EFFECT OF PRODUCTIVE CREDITS IN PRIORITY
ECONOMIC SECTOR AND CONSUMPTIVE CREDITS ON
UNEMPLOYMENT IN SOUTH SULAWESI**

AHMAD MUJADDID

A032171004



PROGRAM MAGISTER

EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

PENGARUH KREDIT PRODUKTIF SEKTOR EKONOMI PRIORITAS DAN KREDIT KONSUMTIF TERHADAP PENGANGGURAN DI SULAWESI SELATAN



Disusun dan diajukan oleh

AHMAD MUJADDID

A032171004

Kepada

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH KREDIT PRODUKTIF SEKTOR EKONOMI PRIORITAS DAN KREDIT
KONSUMTIF TERHADAP PENGANGGURAN DI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

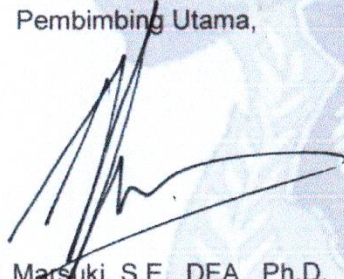
AHMAD MUJADDID

A032171004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal 08 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

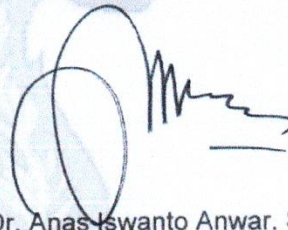
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



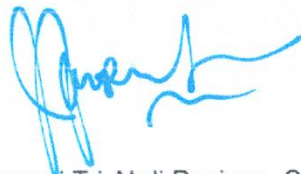
Prof. Marsuki, S.E., DEA., Ph.D.
NIP. 19600626 198803 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A.
NIP. 19630516 199003 1 001

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan



Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, S.E., M.A.
NIP. 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM.
NIP. 19600626 198803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mujaddid
NIM : A032171004
Program Studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul:

Pengaruh Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas dan Kredit Konsumtif terhadap Pengangguran di Sulawesi Selatan

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain dan tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Februari 2021

Yang menyatakan



Ahmad Mujaddid

PRAKATA

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, meminta ampunan, serta berlindung kepada-Nya dari kejelekan jiwa dan keburukan perbuatan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun yang akan mampu menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tak seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Kami bersaksi, bahwa tiada *Ilah* yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dan tiada pula tandingan bagi-Nya. Shalawat dan salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada manusia terbaik, sang revolusioner sajati, yang kepadanya diturunkan al-Qur'an, sumber, inspirasi dan mata air dari segala ilmu, Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, dialah nabi yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan menghamparkan permadani Islam yang nikmat dan manisnya masih kita rasakan hingga saat ini, dengan kelembutan perangainya membuat risalah Islam ini tetap merekah harum mewangi walau beliau telah tiada. Rahmat dan kasih sayang-Nya juga semoga tetap tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan para pengemban risalah Islam.

Tesis dengan judul "Pengaruh Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas dan Kredit Konsumtif terhadap Pengangguran di Sulawesi Selatan" disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program magister strata dua (S2) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta saran-saran dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orang peneliti, Drs. H. Hasbullah Mahdin dan Hj. Fitriani Izzuddin terima kasih kalian telah menjadi orang tua yang sabar dalam membesarkan peneliti, atas kasih sayang yang tulus, perhatian dan pengorbanan yang begitu besar serta doa yang tiada henti dipanjatkan untuk peneliti. Semoga

peneliti dapat memberikan yang terbaik untuk kalian. Kepada pendamping sekaligus teman hidup peneliti, istri tercinta, Mukhlisa Balqis, S.T., yang selalu mampu menghadirkan secuil rasa bahagia yang tumbuh berkecambah dan mengakar. Serta kepada saudara kandung peneliti, Muwahid Ummah, SE., Ak., CA dan Nur Inayah, Arini Mukhlisah, S.Psi dan Marzuki Umar, Lc, Abdullah Mubarak, S.H., Amirah Mufidah dan Muhammad Rasdil, Lc., Ahsan Muzakkir dan Alfiah Maisaro, serta keponakan penulis, Hilyahtul Farhah, Abdurrozzaq/Ucen, Fawwaz, Himma, Thoriq bin Muwahid, Abdullah, Zahron dan Ahmad Syafi' yang jauh di Madinah, semoga ikatan persaudaraan dan kekeluargaan kita tidak hanya terbatas pada ikatan simpul dunia, tapi lebih dari itu, kita berharap semoga dapat terus bersama dalam berbagai kebaikan yang akan mengantarkan kita untuk kembali berkumpul di Surga tertinggi yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* janjikan. Ucapan terima kasih juga peneliti berikan kepada:

- ❖ Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
- ❖ Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Mahlia Muis., SE., M.Si., CWM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si., Ak., CA., CWM., CRP., CRA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- ❖ Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, S.E, M.A. selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.
- ❖ Bapak Prof. Marsuki, SE., DEA., Ph.D. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., M.A. selaku dosen pembimbing II, terima kasih banyak atas arahan,

bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan tesis ini.

- ❖ Ibu Prof Dr. Hj. Nursini, SE., M.A., Bapak Dr. Hamrullah, S.E., M.Si dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si. selaku dosen penguji yang memberikan saran, masukan dan motivasi bagi peneliti untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- ❖ Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., M.A., Bapak Prof. Muhammad Yunus Zain, SE., M.A., Ph.D., Bapak Dr. H. Madris, S.E., DPS., M.Si., CWM., Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., Bapak Dr. Hamrullah., SE., M.Si., Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., Dr. Agussalim, SE., M.Si, Prof. Dr. I Made Benyamin, SE., M.Ec., Bapak Dr. Sultan Suhab, S.E., M.Si., yang telah banyak menginspirasi peneliti selama menjalankan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihatnya kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
- ❖ Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar yang senantiasa membantu dalam pengurusan administrasi.
- ❖ Ikhwah dan adik-adik pengurus UKM LDK MPM Unhas, terkhusus kepada saudara ku Aarsal Salama, S.P. (Insya Allah Magister Agribisnis), Muh. Aqsha Azhar, S.T. (Insya Allah Magister Teknik), Syahril, Fadel dan Rizal dan UKM LDM Darul 'Ilmi FEB Unhas, terima kasih atas segala doa, motivasi, dan dukungan kalian selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
- ❖ Segenap manajemen dan karyawan Cordova Group (Cordova Indonesia, Bin Mahdin, Cordova Hijab, Zultan Agung, Sultan Ayam Geprek dan Yayasan Pendidikan Islam Qurthuba), semoga apa yang kita perjuangkan hari ini berbuah manis di masa yang akan datang.

- ❖ Teman-teman angkatan Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan angkatan 2017.
- ❖ Adik-adik Rohis IRMAJI SMAN 12 Makassar, terima kasih atas senyum dan kebahagiaan yang kalian berikan.
- ❖ Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, tiada yang patut peneliti ucapkan selain doa yang terhaturkan, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dan senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita dan menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang istiqomah yang dimasukkan ke dalam surga-Nya yang tertinggi. *Aamiin ya Robbal 'Alamin*.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

AHMAD MUJADDID. *Pengaruh Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas dan Kredit Konsumtif terhadap Pengangguran di Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Marsuki dan Anas Iswanto Anwar).

Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, dan industri pengolahan) dan kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lain-lain) terhadap pengangguran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Sulawesi Selatan.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit pertanian, kredit konstruksi, dan kredit flat dan apartemen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Kredit industri pengolahan, kredit rumah tinggal, kredit rumah toko dan rumah kantor, kredit kendaraan bermotor, dan kredit lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Kredit perikanan dan kredit pertambangan tidak berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Kredit pertanian, kredit rumah tinggal, kredit flat dan apartemen, dan kredit lainnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran melalui inflasi. Kredit perikanan, kredit pertambangan, kredit konstruksi, kredit industri pengolahan, kredit rumah toko dan rumah kantor, dan kredit lainnya berpengaruh positif terhadap pengangguran melalui inflasi. Kredit pertanian, kredit pertambangan, kredit rumah tinggal, kredit flat dan apartemen, dan kredit lainnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran secara langsung. Kredit perikanan, kredit konstruksi, kredit rumah toko dan rumah kantor, dan kredit kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran secara langsung, sedangkan kredit industri pengolahan tidak berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung.

Kata kunci: pengangguran, kredit produktif, kredit konsumtif, pertumbuhan ekonomi, inflasi.



ABSTRAK

AHMAD MUJADDID. *Pengaruh Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas dan Kredit Konsumtif terhadap Pengangguran di Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Marsuki dan Anas Iswanto Anwar).

Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, dan industri pengolahan) dan kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lain-lain) terhadap pengangguran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Sulawesi Selatan.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit pertanian, kredit konstruksi, dan kredit flat dan apartemen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Kredit industri pengolahan, kredit rumah tinggal, kredit rumah toko dan rumah kantor, kredit kendaraan bermotor, dan kredit lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Kredit perikanan dan kredit pertambangan tidak berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Kredit pertanian, kredit rumah tinggal, kredit flat dan apartemen, dan kredit lainnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran melalui inflasi. Kredit perikanan, kredit pertambangan, kredit konstruksi, kredit industri pengolahan, kredit rumah toko dan rumah kantor, dan kredit lainnya berpengaruh positif terhadap pengangguran melalui inflasi. Kredit pertanian, kredit pertambangan, kredit rumah tinggal, kredit flat dan apartemen, dan kredit lainnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran secara langsung. Kredit perikanan, kredit konstruksi, kredit rumah toko dan rumah kantor, dan kredit kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran secara langsung, sedangkan kredit industri pengolahan tidak berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung.

Kata kunci: pengangguran, kredit produktif, kredit konsumtif, pertumbuhan ekonomi, inflasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
GAMBAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teoritis	16
2.1.1 Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter	16
2.1.2 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter.....	17
2.1.3 Pengangguran	20
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	29
2.1.5 Inflasi	32
2.1.6 Kredit	39
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	48
2.2.1 Hubungan Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi	48
2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran	52
2.2.4 Hubungan Inflasi dan Pengangguran	54

2.2.5	Hubungan Kredit dan Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi	56
2.2.6	Hubungan Kredit dan Pengangguran	58
2.3	Tinjauan Empiris	60
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS		64
3.1	Kerangka Pemikiran	64
3.2	Hipotesis	66
BAB IV METODE PENELITIAN		69
4.1	Jenis dan Sumber Data	69
4.2	Metode Analisis	69
4.3	Uji Asumsi Klasik	75
4.4	Definisi Operasional Variabel	77
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		80
5.1	Deskripsi Data	80
5.1.1	Pengangguran di Sulawesi Selatan	80
5.1.2	Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan	81
5.1.3	Inflasi di Sulawesi Selatan	82
5.1.4	Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas di Sulawesi Selatan	83
5.1.5	Kredit Konsumtif di Sulawesi Selatan	85
5.2	Hasil Analisis	86
5.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	97
5.3.1	Uji Normalitas	97
5.3.2	Uji Multikolinearitas	100
5.3.3	Uji Linearitas	102
5.4	Pembahasan	104
5.4.1	Pengaruh Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas terhadap Pertumbuhan Ekonomi	104
5.4.2	Pengaruh Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas terhadap Inflasi	115
5.4.3	Pengaruh Kredit Konsumtif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	122
5.4.4	Pengaruh Kredit Konsumtif terhadap Inflasi	129

5.4.5	Pengaruh Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas terhadap Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	135
5.4.6	Pengaruh Kredit Sektor Ekonomi Prioritas terhadap Pengangguran melalui Inflasi	138
5.4.7	Pengaruh Kredit Konsumtif terhadap Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi	144
5.4.8	Pengaruh Kredit Konsumtif terhadap Pengangguran melalui Inflasi.....	151
5.4.9	Pengaruh Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas terhadap Pengangguran	157
5.4.10	Pengaruh Kredit Konsumtif terhadap Pengangguran	165
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		170
6.1	Kesimpulan.....	170
6.2	Saran	173

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tinjauan Empiris	60
5.1 Hasil Olah Data Variabel Independen terhadap Variabel Intervening .	87
5.2 Hasil Olah Data Variabel Intervening terhadap Variabel Dependen....	93
5.3 Pengaruh Tidak Langsung.....	94
5.4 Pengaruh Langsung.....	96
5.5 Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Variabel Pertumbuhan Ekonomi	100
5.6 Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Variabel Inflasi	101
5.7 Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Variabel Pengangguran	101
5.8 Hasil Uji Linearitas Terhadap Variabel Pertumbuhan Ekonomi	103
5.9 Hasil Uji Linearitas Terhadap Variabel Inflasi	103
5.10 Hasil Uji Linearitas Terhadap Variabel Pengangguran.....	104
5.11 Hambatan Pemberian Kredit Perikanan.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Pemikiran.....	66
5.1 Hasil Uji Normalitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	97
5.2 Uji Normalitas Terhadap Variabel Inflasi	98
5.3 Uji Normalitas Terhadap Variabel Pengangguran	99

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1 Perbandingan Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2014-2018.....	2
1.2 Kredit Sektor Produktif Sektor Ekonomi Prioritas di Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018.....	5
1.3 Kredit Konsumtif di Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018.....	6
1.4 Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018	9
1.5 Inflasi di Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018.....	10
5.1 Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018	80
5.2 Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2010.....	81
5.3 Inflasi di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018.....	82
5.4 Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018.....	84
5.5 Kredit Konsumtif di Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2018.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

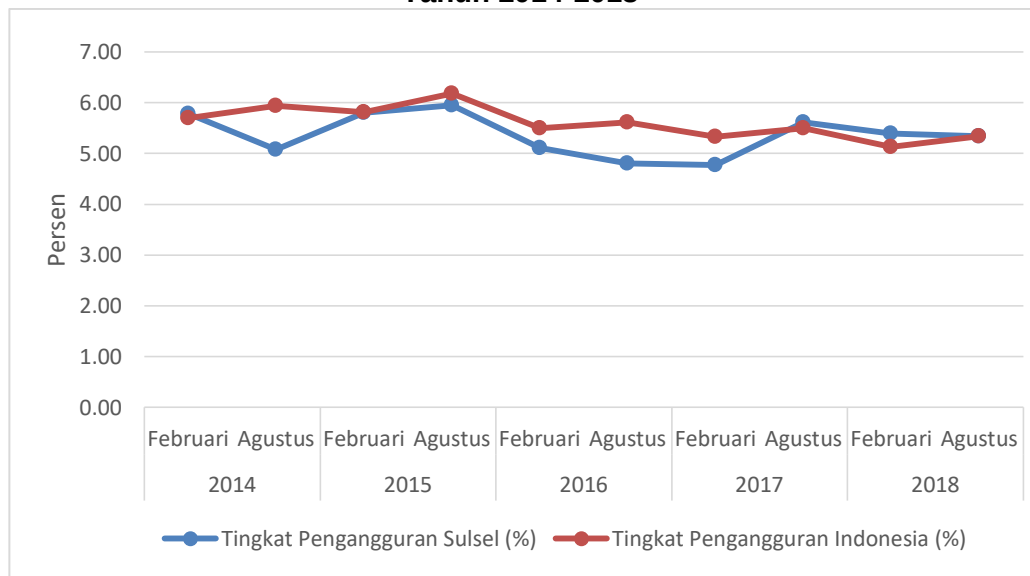
Pembangunan adalah suatu tekad yang kuat untuk meningkatkan dan menghadirkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Pembangunan yang dilakukan pada berbagai sektor ekonomi yang melibatkan kegiatan produksi ditujukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi sehingga mampu mengatasi beragam permasalahan dalam perekonomian, seperti kemiskinan, pengangguran, menjaga kestabilan harga, dan peningkatan kesempatan kerja. Upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia, telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti menerapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki tujuan yang harus diwujudkan, yaitu mencapai stabilitas perekonomian dalam kondisi kesempatan kerja penuh, mencapai inflasi yang terkontrol, tingkat pengangguran yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya mengalami perubahan, dengan perubahan tersebut juga akan berpengaruh terhadap salah satu permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satu permasalahan tersebut yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi, tingkat pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif, dampak negatif tersebut tidak hanya akan berpengaruh terhadap individu, melainkan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami.

Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan yang tinggi.

Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan dalam satu dasawarsa terakhir memiliki catatan angka tingkat pengangguran yang juga masuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian penting untuk mengamati potret angka tingkat pengangguran tersebut dalam kaitannya dengan faktor lain yang terkait.

Grafik 1.1
Perbandingan Tingkat Pengangguran Sulawesi Selatan dan Indonesia
Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik.

Mengamati data tingkat pengangguran di Indonesia dan Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai tahun 2018 senantiasa berfluktuasi. Angka tingkat pengangguran di Indonesia berkisar antara 5 sampai 6 persen. Dengan catatan tertinggi di bulan agustus 2015 yaitu sebesar 6,18 persen dan yang terendah sebesar 5,13 persen di bulan februari 2018. Untuk Sulawesi Selatan pada februari 2014 tingkat pengangguran tercatat sebesar 5,78 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,70 persen pada agustus di tahun yang sama

sehingga tingkat pengangguran menjadi 5,08 persen. Memasuki tahun 2015 bulan februari angka pengangguran kembali mengalami peningkatan dan tercatat sebesar 5,80 persen dan kembali meningkat pada agustus 2015 menjadi 5,95 persen yang merupakan catatan angka tingkat pengangguran tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka tingkat pengangguran mengalami penurunan pada februari dan agustus 2016 masing-masing mencatatkan angka 5,11 persen dan 4,80 persen. Pada tahun 2017 angka tingkat pengangguran kembali mengalami penurunan dan merupakan catatan terbaik angkat tingkat pengangguran yaitu sebesar 4,77 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada bulan agustus yaitu sebesar 5,61 persen atau meningkat sebesar 0,84 persen. Tahun 2018 angka tingkat pengangguran bergerak tipis di angka 5,39 persen di bulan februari dan 5,34 persen di bulan agustus. Meskipun secara umum catatan angka tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan mengalami penurunan, namun demikian angka absolut tahun 2018 menunjukkan jumlah pengangguran masih dalam kategori tinggi.

Pengangguran sebagai masalah pelik yang tak kunjung teratasi akan menjadi bayang-bayang gelap bagi suatu negara. Pengangguran yang tinggi akan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan yang menjadi indikasi kuat gagalnya negara menghadirkan kemakmuran di tengah masyarakat. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sementara itu pengangguran yang besar merupakan pemborosan sumber daya dan potensi, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat

mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Hambatan pembangunan tentu akan berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, sehingga harus dengan segera untuk diatasi. Salah satunya melalui pendekatan moneter yaitu melalui jalur sektor finansial. Peran sektor finansial khususnya industri perbankan dalam perekonomian suatu wilayah sangat vital. Bank dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui berbagai instrumennya. Salah satu tujuan dari perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke sektor ekonomi dalam bentuk kredit yang akan mendorong bergelornya dunia usaha sehingga dapat memberi sumbangsih terhadap bertumbuhnya ekonomi suatu negara.

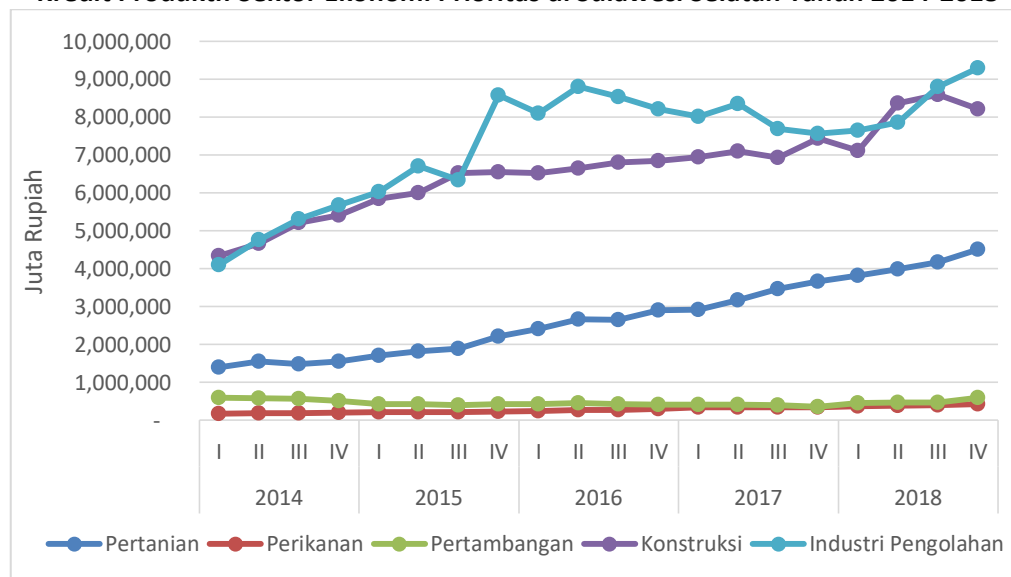
Pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai adalah bagian integral dari proses pengucuran kredit. Sehingga pengucuran kredit harus benar-benar tepat sasaran, mampu mengurai dan mereduksi berbagai permasalahan makro ekonomi yang dihadapi yang berdampak luas dan menyeluruh. Pada titik inilah peran vital lembaga perbankan dibutuhkan untuk melaksanakan fungsinya. Namun demikian, kredit perbankan tidak selalu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif kredit perbankan terhadap perekonomian hanya akan terjadi apabila kualitas fundamental di suatu negara seperti kapital fisik (*gross capital formation*) atau kualitas infrastruktur telah mencapai tingkatan tertentu yang cukup untuk mendorong produktivitas dan kompetitivitas sektor riil (Augier dan Soedarmono, 2011).

Pada tingkat individu, perbankan akan mendorong intermediasi finansial secara optimal dengan memberikan suku bunga kredit yang

kompetitif apabila manajemen bank telah mencapai tingkat efisiensi biaya tertentu dalam memperoleh dan mengolah informasi dari debitur secara berkala. Dalam konteks ini, teori menunjukkan bahwa terdapat efek ambang (*threshold effect*) tertentu yang harus diatasi, sebelum sektor finansial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Industri perbankan mempunyai peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat ke dalam investasi aset produktif yang akan mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi kapital, dan pertumbuhan output agregat (Hung dan Cothorn, 2002). Pengucuran kredit produktif pada sektor-sektor ekonomi tentu akan memberi efek terhadap sektor tersebut berkaitan dengan sumbangsihnya/kontribusinya pada PDB atau PDRB.

Grafik 1.2
Kredit Produktif Sektor Ekonomi Prioritas di Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018



Sumber: Bank Indonesia Tahun 2014-2018.

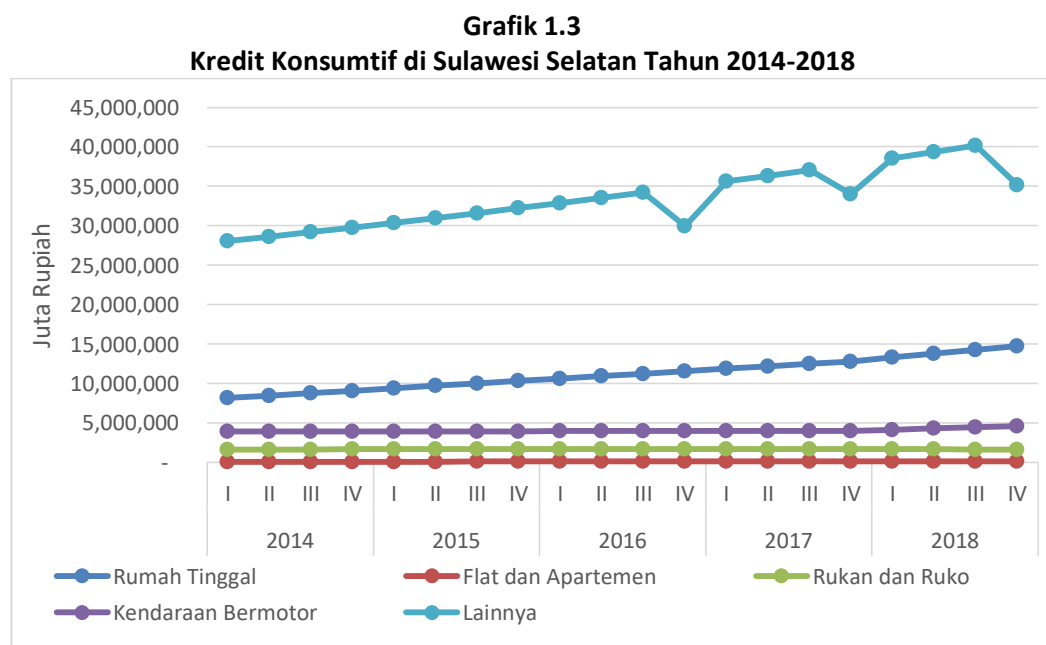
Pemerintah telah menetapkan lima sektor ekonomi prioritas pada program Nawacita, namun demikian tidak setiap sektor pada program Nawacita mempunyai data terkait dengan alokasi kredit perbankan ke sektor

tersebut sehingga dilakukan *proxy* alokasi kredit sektoral yang sesuai dengan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor konstruksi (mewakili sektor infrastruktur) dan sektor industri pengolahan (mewakili produk berorientasi ekspor).

Pada **Grafik 1.2** menunjukkan data kredit produktif sektor ekonomi prioritas di Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai tahun 2018. Secara umum kredit produktif sektor ekonomi prioritas mengalami peningkatan dari periode ke periode. Peningkatan penyaluran terhadap kredit produktif pada sektor ekonomi prioritas utamanya disebabkan oleh kepercayaan lembaga perbankan kepada masyarakat pada saat kondisi ekonomi memasuki tahap ekspansi. Namun demikian jika dilihat dari kontribusi kredit, kredit ke sektor pertanian masih relatif kecil. Pada tahun 2014 triwulan I porsi penyaluran ke sektor pertanian hanya sebesar Rp.1.391 miliar atau 1,60 persen dari total kredit. Pada sektor perikanan yang dipandang memiliki potensi yang cukup besar baik dari sisi pemasaran produk (*demand*) maupun sisi penyediaan produk-produk perikanan (*supply*), penyaluran kredit ke sektor perikanan masih tergolong sangat rendah, yaitu hanya sebesar 0,19 persen dari total kredit secara keseluruhan pada tahun 2014. Porsi penyaluran kredit pada sektor pertambangan terhadap total kredit hanya sebesar 0,68 persen pada tahun 2014. Sektor pertambangan dipandang cukup berisiko mengingat *success rate* di bidang pertambangan dinilai cukup rendah. Selain itu, kredit sektor pertambangan juga dipandang berisiko karena bersifat *cyclical* atau dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Pada sektor konstruksi terdapat peluang dalam hal pembiayaan, namun jumlah kredit pada sektor ini per triwulan IV tahun 2018 baru sebesar Rp.8.209 miliar atau hanya 6,00 persen dari total kredit, rendahnya pembiayaan di sektor konstruksi dipengaruhi oleh

karakteristik sektor konstruksi yang memerlukan dana dalam jumlah besar serta jangka waktu pengembalian (*pay-back period*) yang relatif panjang. *Share* sektor industri pengolahan menempati posisi yang cukup signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan yaitu sebesar 12,86 persen pada tahun 2018, namun demikian laju pertumbuhan penyaluran kredit pada sektor ini cenderung lambat yang disebabkan oleh penurunan kondisi perekonomian dan tertekannya produktivitas sektor industri.

Juga menjadi penting untuk diamati adalah kredit konsumtif yang dikucurkan oleh perbankan, karena seringkali justru jenis kredit konsumtiflah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Dalam hal ini kredit konsumtif terdiri dari lima bagian yaitu kredit rumah tinggal, kredit flat dan apartemen, kredit rumah toko dan rumah kantor, kredit kendaraan bermotor dan kredit lainnya. Berkaitan dengan hal itu berikut adalah data kredit konsumtif yang disalurkan oleh perbankan di Sulawesi Selatan.



Sumber: Bank Indonesia Tahun 2014-2018.

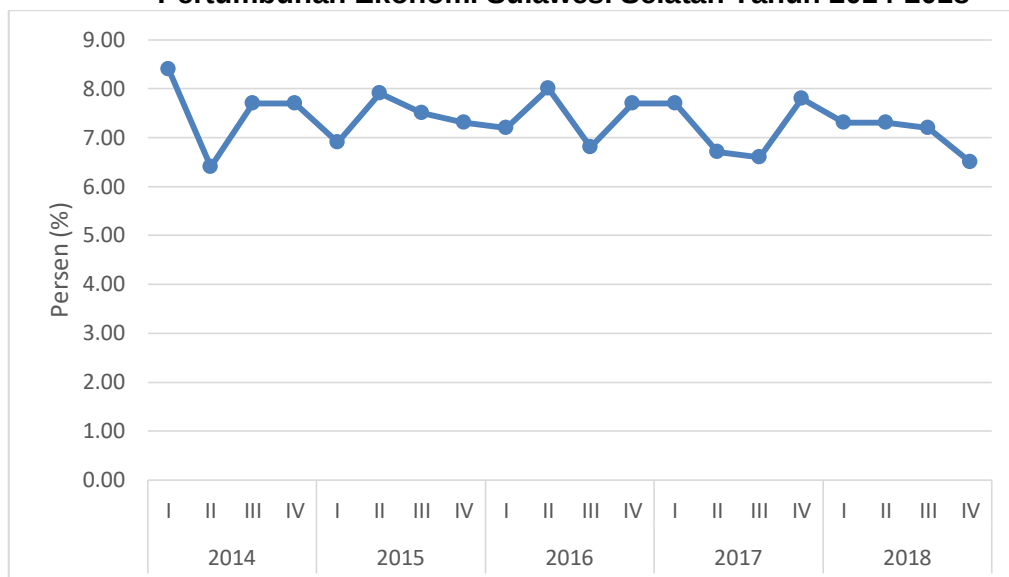
Pada **Grafik 1.3** menunjukkan data kredit konsumtif di Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai tahun 2018. Secara umum kredit konsumtif mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Kredit rumah tinggal meningkat secara signifikan, pada triwulan I tahun 2014 tercatat hanya sebesar Rp.8.166 miliar meningkat menjadi Rp.14.744 miliar pada triwulan IV tahun 2018. Kredit rumah toko dan rumah kantor, kredit flat dan apartemen dan kredit kendaraan bermotor meningkat tipis pada periode triwulan I tahun 2014 sampai triwulan IV tahun 2018. Adapun kredit lainnya mencatatkan angka tertinggi pada kategori kredit konsumtif yang disalurkan yaitu sebesar Rp.28.051 miliar pada triwulan I tahun 2014 dan meningkat menjadi Rp.35.154 miliar pada triwulan IV tahun 2018.

Penyaluran kredit merupakan fokus dan kegiatan utama perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Oleh karena itu, perkreditan tidak dapat dipisahkan dari gerak nadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baik melalui perluasan produksi dan kegiatan usaha lainnya maupun melalui pengaruhnya dalam mendorong munculnya unit-unit usaha baru. Selain itu, kredit perbankan dapat diarahkan untuk pemerataan kesempatan berusaha seperti alokasi pemberian kredit menurut prioritas pembangunan dan golongan ekonomi sehingga pada gilirannya dapat memperluas pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Sukirno (2006) menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan demi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Grafik 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018



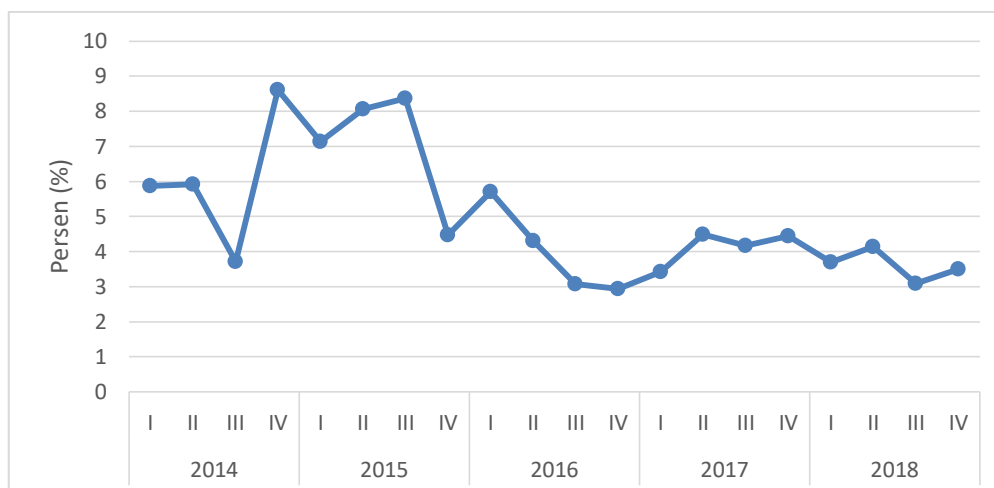
Sumber: Badan Pusat Statistik.

Jika menilik dalam lima tahun terakhir angka statistik mencatatkan capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berfluktuasi. **Grafik 1.4** menunjukkan data pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I tahun 2014 sampai triwulan IV tahun 2018. Pada triwulan I tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tercatat berada dalam posisi 8,40 persen, kemudian mengalami penurunan pada triwulan II yaitu sebesar 6,40 persen atau menurun sebesar 2,00 persen dan kembali meningkat pada

triwulan III dan IV dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang sama 7,70 persen. Pada tahun 2015 di triwulan I tercatat sebesar 6,90 persen, triwulan II, III dan IV konsisten berada pada kisaran angka 7 persen. Di tahun 2016 pada triwulan II pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 8,00 persen. Adapun di akhir periode penelitian yaitu di tahun 2018 triwulan IV pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,50 persen.

Penyaluran kredit selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, di satu sisi berdasarkan beberapa literatur, pertumbuhan kredit yang berlebihan dapat mengancam kestabilan ekonomi makro. Peningkatan kredit khususnya kredit konsumsi dapat memicu pertumbuhan permintaan agregat di atas output potensial yang mengakibatkan perekonomian menjadi *mamamas*, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan inflasi, *deficit current account* serta apresiasi nilai tukar riil. Pada saat yang bersamaan, selama periode ekspansi institusi perbankan cenderung memiliki ekspektasi yang terlalu optimis pada kemampuan membayar nasabah dan kurang hati-hati dalam memberikan kredit kepada golongan beresiko tinggi. Sebagai akibatnya terjadi penumpukan pinjaman yang berpotensi menjadi *bad loans* pada periode ekonomi kontraksi.

Grafik 1.5
Inflasi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018



Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia.

Grafik 1.5 menunjukkan angka inflasi Sulawesi Selatan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Secara umum data inflasi di Sulawesi Selatan berfluktuasi pada setiap periode. Pada triwulan I tahun 2014 angka inflasi sebesar 5,88 persen kemudian mengalami peningkatan pada triwulan II yaitu sebesar 5,92 persen. Pada triwulan IV tahun 2014 angka inflasi tercatat sebesar 8,61 persen dan merupakan catatan angka inflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 angka inflasi terus mengalami penurunan dari angka 5,70 persen pada triwulan I dan 4,30 persen, 3,07 persen dan 2,94 persen pada triwulan II, III dan IV. Pada tahun 2016 dan 2017 catatan angka inflasi berkisar antara angka 3 persen sampai 4 persen. Angka inflasi ini mencerminkan stabilitas ekonomi, jika tingkat inflasi meningkat, masyarakat cenderung mengurangi *saving/investasi*, maka aset perbankan secara riil akan menurun, sehingga akan memengaruhi kemampuan operasi perbankan dalam penyaluran kreditnya (Haryati 2007). Tekanan inflasi yang cukup kuat dapat mendorong Bank Sentral melakukan kebijakan moneter melalui peningkatan suku bunga, bank akan mengalami perlambatan dalam menghimpun dana masyarakat sehingga dana yang dialokasikan dalam kredit menjadi berkurang.

Pertumbuhan ekonomi yang baik sejatinya harus mampu menjadi penawar dari banyaknya permasalahan ekonomi makro yang hadir, salah satunya adalah tingkat pengangguran. Masalah pengangguran menjadi isu utama yang harus diminimalisir jumlahnya. Pengangguran merupakan salah satu cermin dari pencitraan kondisi kesejahteraan suatu negara. Hal ini menjadi tolok ukur apakah program perekonomian dan kesejahteraan sosial yang dicanangkan pemerintah berhasil atau tidak.

Di lain sisi karakteristik perbankan di Indonesia dianggap paling rapuh di ASEAN (Soedarmono et al., 2015), ditunjukkan dengan rasio pendalaman finansial baik dari pasar kredit maupun simpanan, posisi Indonesia berada di level terendah di ASEAN. Perbankan Indonesia juga dipandang relatif kurang efisien dalam biaya intermediasi, dilihat dari *net interest margin* yang tinggi. Secara teoritis, kebijakan moneter digunakan oleh bank sentral dalam jangka pendek untuk mencapai dua sasaran, yaitu menjaga aktivitas ekonomi (pertumbuhan ekonomi) tetap tinggi dan mencapai tingkat inflasi yang rendah (Dornbusch, et al, 2008). Fakta empiris menunjukkan bahwa terdapat *trade-off* antara kedua sasaran tersebut, di mana meningkatnya pertumbuhan *output* (atau penurunan tingkat pengangguran) cenderung diikuti oleh meningkatnya tingkat inflasi. Akibatnya, pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang kemudian akan berpengaruh pada angka tingkat pengangguran perlu dikaji lebih mendalam.

Bedasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji penelitian terkait dengan penyaluran kredit produktif sektor ekonomi prioritas dan kredit konsumtif terhadap tingkat pengangguran dengan menggunakan variabel intervening pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan judul **“Pengaruh Kredit**

Produktif Sektor Ekonomi Prioritas dan Kredit Konsumtif terhadap Pengangguran di Sulawesi Selatan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Bagaimana pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) terhadap inflasi?
3. Bagaimana pengaruh kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Bagaimana pengaruh kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) terhadap inflasi?
5. Bagaimana pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi?
6. Bagaimana pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) terhadap pengangguran melalui inflasi?
7. Bagaimana pengaruh kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi?

8. Bagaimana pengaruh kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) terhadap pengangguran melalui inflasi?
9. Bagaimana pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) terhadap pengangguran?
10. Bagaimana pengaruh kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) terhadap pengangguran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) terhadap inflasi.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) terhadap pertumbuhan inflasi.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.

6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) terhadap pengangguran melalui inflasi.
7. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.
8. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) terhadap pengangguran melalui inflasi.
9. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit produktif sektor ekonomi prioritas (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) terhadap pengangguran.
10. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) terhadap pengangguran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ekonomi pembangunan dan perencanaan, secara khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai kredit sektoral ekonomi prioritas, kesempatan dan pengangguran di Indonesia.
2. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat dan membahas tema atau sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter

Stabilitas sistem moneter dan sistem perbankan merupakan dua aspek yang saling terkait dan menentukan satu sama lain. Stabilitasnya sistem perbankan secara umum dicerminkan dengan kondisi perbankan yang sehat dan berjalannya fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Apabila kondisi ini terpelihara, maka proses perputaran uang dan mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian yang sebagian besar berlangsung melalui sistem perbankan juga dapat berjalan dengan baik. Stabilitasnya sistem perbankan akan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter (Warjiyo, 2007). Bank Sentral memiliki peranan yang penting dalam perekonomian di suatu negara. Bank sentral memiliki dua tujuan pokok, yaitu :

1. Menjaga stabilitas harga dan memacu pertumbuhan ekonomi.
2. Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas keuangan.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter di setiap negara dalam bentuk pengendalian besaran moneter. Kebijakan moneter itu sendiri saling berkaitan satu sama lain, dan memungkinkan *trade off* dalam penerapannya. Dalam praktiknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan adalah terjaganya stabilitas ekonomi makro yang tercermin oleh stabilitas harga (inflasi yang terkontrol), membaiknya pertumbuhan ekonomi serta luasnya lapangan kerja.

Efektifitas kebijakan moneter ini sangat berperan dalam menjalankan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, dan fungsi bank sentral sebagai pengendali stabilitas moneter. Dengan menggunakan berbagai macam instrumen Bank Sentral berfungsi sebagai lembaga stabilisator makro ekonomi, dan bank umum dari sisi mikro ekonomi menjaga stabilitas moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Besaran moneter (*stock money*) dapat berupa uang beredar dalam arti sempit dan dalam arti luas, uang primer atau kredit perbankan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian (tertutup atau terbuka), serta faktor-faktor fundamental lainnya (Warjiyo, 2007).

2.1.2 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Implementasi kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dari kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektoral dan kebijakan lainnya, semuanya akan mengarah pada pencapaian suatu tujuan akhir, yaitu kesejahteraan sosial masyarakat (*social welfare*). Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang merupakan suatu kebijakan yang terkait dengan anggaran pemerintah bersama-sama dengan kebijakan moneter mempengaruhi sisi penawaran (*demand side*) dalam perekonomian, kebijakan sektoral seperti kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, tenaga kerja dan lainnya akan mempengaruhi sisi penawaran (*supply side*) dari perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara bersama-sama dapat saja memberikan pengaruh dengan

arah yang saling bertentangan sehingga saling meniadakan ataupun memperlemah. Hal ini disebut sebagai benturan kebijakan (*policy conflict*).

Bagaimana suatu kebijakan moneter menyentuh sektor riil merupakan suatu proses yang kompleks karena uang berkaitan erat dengan hampir seluruh aspek kehidupan dalam perekonomian. Proses ini disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai sejak otoritas moneter atau bank sentral bertindak menggunakan instrumen moneter dalam implementasi kebijakan moneternya sampai terlihat pengaruh terhadap aktifitas perekonomian, baik secara langsung maupun secara bertahap. Pengaruh tindakan otoritas moneter terhadap aktivitas perekonomian ini terjadi melalui berbagai jalur (*channels*), di antaranya melalui jalur uang atau langsung, jalur suku bunga, jalur kredit, dan jalur harga aset. Di bidang keuangan kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar dan harga saham disamping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi dan saham. Sementara itu di sektor riil, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi kegiatan konsumsi, investasi dan produksi, ekspor dan impor serta harga barang dan jasa pada umumnya.

Dalam teori ekonomi moneter, mekanisme transmisi kebijakan moneter sering disebut *black box* (Mishkin, 1995), karena transmisi yang dimaksud banyak dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :

1. Perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan.
2. Lamanya tenggang waktu (*time lag*) sejak tindakan otoritas moneter sampai sasaran tercapai.

3. Terjadinya perubahan pada jalur-jalur transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara-negara yang bersangkutan.

Perubahan perilaku otoritas moneter, perbankan dan sektor keuangan serta pelaku ekonomi akan berpengaruh pada interaksi yang dilakukannya dalam berbagai aktivitas perekonomian dan akan membawa perubahan pada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dalam banyak hal, karena merupakan perubahan perilaku dan ekspektasi, mekanisme transmisi kebijakan moneter dimaksud diliputi ketidakpastian dan relatif sulit diprediksi (Blinder, 1998). Setiap perubahan kebijakan otoritas moneter akan senantiasa diikuti oleh perubahan perilaku dunia keuangan dan perbankan serta para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitasnya. Seperti misalnya pernyataan dari seorang Ketua Dewan Gubernur terutama Federal Reserve Bank Amerika Serikat akan berpengaruh pada ekspektasi para pelaku pasar keuangan di berbagai kawasan dunia. Demikian pula perubahan perilaku dunia perbankan dalam operasi perbankan dengan adanya inovasi baru, seperti keengganan bank dalam menyalurkan kredit dan maraknya produk derivatif dalam transaksi valuta asing, juga akan mempengaruhi mekanisme transmisi kebijakan moneter sehingga otoritas moneter perlu mempertimbangkan perubahan ini dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya.

Menurut Friedman dan Schwartz (1963) terdapatnya tenggang waktu yang cukup lama dan bervariasi dalam transmisi kebijakan moneter ke pertumbuhan ekonomi dan inflasi telah lama disadari. Hal ini disebabkan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan perekonomian negara yang bersangkutan. Dalam sebuah

perekonomian yang masih tradisional dan sifatnya tertutup dengan perbankan sebagai satu-satunya lembaga keuangan, hubungan antara uang beredar dengan aktivitas ekonomi riil masih relatif erat. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangannya perekonomian suatu negara dan semakin majunya sektor keuangan, keterkaitan antara uang beredar dengan sektor riil menjadi semakin merenggang. Sebagian dana yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan dapat terus berputar di sektor keuangan saja dan tidak menyentuh sektor riil. Pola hubungan variabel-variabel ekonomi dan keuangan yang berubah dan semakin tidak erat tersebut akan berpengaruh pada lamanya tenggang waktu mekanisme transmisi kebijakan moneter.

2.1.3 Pengangguran

Menurut Sukirno (2004) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.

Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja (Sadono, 2008). Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja

yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang di minta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2015).

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. (Samuelson dan Nordhaus, 2010) menjelaskan bahwa seseorang digolongkan sebagai pengangguran jika mereka tidak memiliki pekerjaan, secara aktif mencari pekerjaan dalam empat minggu sebelumnya, dan saat ini bersedia untuk bekerja.

Pengangguran merupakan masalah yang dianggap sangat serius, tidak hanya di negara-negara berkembang namun juga di negara-negara maju. Masalah pengangguran secara langsung akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan aktivitas perekonomian di suatu negara. Masalah pengangguran juga dapat menimbulkan multi efek buruk, baik yang bersifat ekonomi, sosial maupun politik. Hal yang sama diungkapkan oleh Harfina bahwa masalah pengangguran baik di negara maju maupun negara berkembang menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, terutama berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi (Harfina, 2009).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga turut memiliki masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat

kompleks karena selain mempengaruhi juga sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Muslim, 2014).

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-teori Pengangguran di Indonesia yaitu :

1. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004).

2. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun, hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2003). Tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya.

Dalam menganalisis masalah pengangguran yang menjadi perhatian utama bukanlah jumlah pengangguran, tapi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran (*unemployment rate*) adalah rasio jumlah orang yang tidak bekerja terhadap jumlah orang dalam angkatan kerja (Blanchard dan Johnson, 2017). Sukirno (2000) mendefinisikan

kesempatan kerja penuh (*full employment*) sebagai keadaan di mana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu tertentu sepenuhnya bekerja. Apabila pengangguran dalam suatu perekonomian mencapai 5 persen, maka perekonomian tersebut sudah dapat dianggap mencapai kesempatan kerja penuh.

Menurut sebabnya, pengangguran dibedakan menjadi empat jenis:

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekadar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran friksional tidak bisa dielakkan dari perekonomian yang sedang berubah. Untuk beberapa alasan, jenis-jenis yang dikonsumsi perusahaan dan rumah tangga bervariasi sepanjang waktu. Ketika permintaan terhadap barang bergeser, begitu pula permintaan terhadap tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut.

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu sudah dipandang telah mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena adanya problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut. Dengan kata lain tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemorosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemorosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

3. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan sangat banyak. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan oleh kemorosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan

mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan adanya modernisasi atau kemajuan teknologi dalam bekerja, contohnya: pabrik yang dulu menggunakan tenaga kerja manusia diganti dengan mesin mesin, akibatnya terjadi pengangguran akibat mesin tersebut.

Sadono Sukirno mengklasifikasi pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja.

Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Pengangguran Tersembunyi/Terselubung

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

3. Setengah Penganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang digolongkan sebagai setengah menganggur.

4. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabila dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

Dalam membahas pengangguran yang menjadi pokok perhatian bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja. Untuk melihat jangkauan pekerja (kesempatan kerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka.

Definisi dari tingkat pengangguran terbuka ialah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerja, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada (BPS, 2015). Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.

Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 Penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (*open unenployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang digolongkan setengah pengangguran (*Underemployment*) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Namun masih mau menerima pekerjaan, serta mereka yang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. Pekerja digolongkan setengah pengangguran

parah (*several underemployment*) bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu.

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja di sektor modern atau di kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu beberapa lama. Tidak menutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan itu di kota atau di provinsi atau daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang (Mudrajat, 2006).

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk kepada perkembangan kegiatan perekonomian suatu negara yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan pengembangan langsung dari teori makro ekonomi Keynes, yang memberikan peranan kunci pada tabungan dan investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi dapat menciptakan pendapatan. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Peranan yang pertama dapat dianggap sebagai dampak permintaan, sedangkan yang kedua dapat dianggap sebagai penawaran investasi. Karena itu selama investasi

neto tetap berlangsung pendapatan nyata dan output akan senantiasa meningkat.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Perkembangan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan prestasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Sadono, 2006).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak. Boediono (1992) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal perekonomian itu, artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri.

Menurut Sukirno (2004), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun

ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: Produk Domestik Bruto (PDB) apabila di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto apabila di tingkat regional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar dan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi,

dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 2008). Sementara Todaro (2006) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang baik dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar.

2.1.5 Inflasi

Angka inflasi sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi makro kerap kali menjadi pusat perhatian bagi para pengamat ekonomi secara khusus dan masyarakat secara umum. Turun naiknya angka inflasi setidaknya menjadi cerminan gejolak perekonomian di suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi tentu menjadi hal yang sangat merugikan bagi perekonomian suatu negara. Berbagai penelitian membuktikan bahwa di negara-negara dunia ketiga, keadaan ekonomi yang buruk dan cenderung kurang menguntungkan telah memacu tingkat inflasi yang tinggi, yang pada gilirannya akan menjadi malapetaka bagi masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang berkaitan dengan dampaknya yang sangat luas terhadap makro ekonomi. Inflasi sangat berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana melalui lembaga keuangan informal. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dan persisten dari suatu perekonomian (Susanti, 2000). Inflasi juga

dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai mata uang suatu negara (Isa Salim, 2006). Jadi inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Seiring dengan kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut. Namun tidak semua kenaikan harga menyebabkan inflasi. Harga masing-masing barang dan jasa ditentukan dengan banyak cara. Dalam pasar persaingan sempurna, interaksi banyak pembeli dan penjual, yakni bekerjanya penawaran dan permintaan menentukan harga.

Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negara. Inflasi didefinisikan sebagai suatu kenaikan tingkat harga secara keseluruhan di dalam suatu perekonomian (Mankiw, 2003). Terjadinya inflasi merupakan akibat dari kenaikan tingkat harga di atas rata-rata yang berlaku umum yang dapat diukur dengan indeks harga barang-barang konsumsi dari tahun ke tahun.

Definisi lain inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus (Boediono, 1989). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediannya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan semakin besar

perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kesehatan ekonomi (Soesastro, 2005).

Pemahaman awal tentang inflasi lebih menekankan pada nilai uang. Keseluruhan tingkat harga dalam perekonomian dapat dipandang dari dua sisi, yaitu tingkat harga sebagai harga sejumlah barang dan jasa. Ketika tingkat harga naik maka orang harus membayar lebih untuk membeli barang dan jasa. Sebagai alternatif, kita memandang tingkat harga sebagai ukuran nilai uang. Kenaikan tingkat harga berarti nilai uang menjadi lebih rendah. Apabila hal ini diungkapkan secara matematis, maka anggaplah P sebagai tingkat harga yang diukur, misal oleh indeks harga konsumen atau deflator PDB. Maka, P mengukur jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa. Jika dibalik, maka jumlah barang dan jasa dapat diperoleh dengan \$ 1 adalah $1/P$. Dengan kata lain, bila P merupakan harga barang dan jasa yang diukur dalam nilai uang, maka $1/P$ merupakan nilai uang yang diukur dalam barang dan jasa. Ini berarti ketika tingkat harga keseluruhan naik, maka nilai uang jatuh (Mankiw, 2006).

Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi (Pratama, 2008), yaitu sebagai berikut:

1. Kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya.
2. Bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.
3. Berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing teori ini menyatakan aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga. Teori tersebut diantaranya yaitu:

1. Teori Keynes

Menurut teori ini adalah inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (Boediono,1985).

2. Teori Kuantitas

Menurut teori ini inflasi terjadi karena adanya penambahan volume uang yang beredar (apakah berupa penambahan uang giral atau kartal) tanpa diimbangi oleh penambahan arus barang dan jasa serta harapan masyarakat mengenai kenaikan harga dimasa akan datang (Boediono,1985).

3. Teori Strukturalis

Teori inflasi jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi. Karena struktur pertambahan produksi barang-barang ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya, adalah kenaikan harga-harga lain, sehingga terjadi inflasi.

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu (Prathama, 2008).

Diantaranya yaitu:

1. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index* atau *CPI*).

Indeks harga konsumen atau disingkat IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Dalam indeks harga konsumen, setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan atau bobot tetap yang proporsional terhadap kepentingan relatif dalam anggaran pengeluaran konsumen.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*).

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (*producer price index*). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

3. Indeks Harga Implisit (*GNP Deflator*)

Indeks harga implisit (*GNP Deflator*) adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100. GNP Riil adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian, yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar (*base year*).

4. Alternatif dari Indeks Harga Implisit.

Mungkin saja terjadi, pada saat ingin menghitung inflasi dengan menggunakan IHI tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data IHI.

Hal ini bisa diatasi. Sebab prinsip dasar penghitungan inflasi berdasarkan deflator PDB (*GDP Deflator*) adalah membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil. Selisih keduanya merupakan tingkat inflasi.

Dilihat dari faktor penyebab timbulnya, inflasi dalam tiga macam (Prathama, 2008) yaitu:

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-Pull Inflation*).

Inflasi tarikan permintaan atau disebut juga inflasi sisi permintaan (*demand-side inflation*) atau inflasi karena guncangan permintaan (*demand-shock inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.

2. Inflasi Dorongan Biaya (*Cost-Push Inflation*).

Inflasi dorongan biaya atau juga sering disebut inflasi sisi penawaran (*supply-side inflation*) atau inflasi karena guncangan penawaran (*supply-shock inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi supply barang dan jasa mereka ke pasar.

Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

1. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun).
2. Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun).
3. Inflasi berat (antara 30%-100% setahun).
4. Hiperinflasi (diatas 100% setahun).

Inflasi yang tinggi tidaklah baik karena akan menyengsarakan masyarakat dalam suatu negara. Sebaliknya inflasi yang terlalu rendah juga sangat merugikan negara, maka dari itu kondisi inflasi yang terkontrol atau inflasi yang wajarlah yang dapat memberikan kondisi positif dan kondusif bagi perekonomian suatu negara. Inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang akibat naiknya tingkat harga. Inflasi berpengaruh besar terhadap produksi maupun ekspor dan impor. Inflasi menyebabkan turunnya produksi, terutama produksi barang yang akan diekspor. Turunnya produksi ini disebabkan karena biaya produksi akan meningkat sehingga harga pokok dari hasil yang diproduksi juga meningkat.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya inflasi dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh.
2. Inflasi dapat menyebabkan penurunan di dalam efisiensi ekonomi (*economic efficiency*).
3. Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja (*employment*).
4. Inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil (*unsable enviroment*) bagi keputusan ekonomi.

Adapun dampak inflasi yang dirasakan oleh individu dan masyarakat yaitu:

1. Memperburuk distribusi pendapatan.
2. Pendapatan riil merosot.

2.1.6 Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kredit berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka orang tersebut sudah diberikan kepercayaan. Sedangkan bagi pemberi kredit artinya ia telah memberi kepercayaan bahwa uang yang telah dipinjamkan akan kembali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Menurut Simorangkir (2005) kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang datang. Sedangkan menurut Kent (2003) kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Jakile (dalam Budianty, 2008) mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari perjanjian untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu. Adapun menurut Suyatno (1990) bahwa kredit adalah merupakan suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang. Savelberg (1991) menyatakan kredit mempunyai arti antara lain kredit sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain berupa suatu prestasi dan kredit sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain

dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu.

Pengertian kredit juga dikemukakan oleh Sinungan (1995) yang menyatakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan datang dan disertai dengan suatu kontra prestasi berupa uang. Adapun definisi kredit dalam arti hukum menurut Levy (1999) adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit.

Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu dibelakang hari. Sedangkan pengertian yang lebih baik untuk kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 pasal (1) ayat 11 menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana yang disebut di atas, tidak semua kegiatan pinjam meminjam dapat dikategorikan kredit bagi perbankan. Suatu pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang. Adapun pihak yang melakukan penyediaan uang tersebut adalah perbankan. Bank adalah penyedia dana tersebut yang kemudian disebut dengan nama kredit atau plafond kredit.

2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam suatu perjanjian kredit, akad kredit dan sebagainya.
3. Adanya kewajiban melunasi utang. Pinjam meminjam uang adalah suatu utang dimana pihak peminjam wajib melunasinya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut.
4. Adanya jangka waktu tertentu. Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempnaan bagi debitur untuk melunasinya.
5. Adanya pemberian bunga kredit, terhadap suatu kredit sebagai bentuk peminjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang telah diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Suku bunga tersebut terkadang juga disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit dalam perjanjian yang dilakukan pembayarannya oleh debitur maka pendapatan bunga tersebut akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Kasmir (2008) mengemukakan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit,

antara lain:

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.
2. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka Waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun risiko yang tidak disengaja.
5. Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank.

Menurut Kasmir (2008) bahwa secara umum jenis-jenis kredit dapat ditinjau dari berbagai sudut diantaranya ditinjau dari sudut kegunaan, yaitu:

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya.

2. Kredit produktif, yang terdiri dari kredit investasi (yang dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin, dan sebagainya) dan kredit modal kerja (digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan).

Adapun definisi untuk kredit konsumsi sesuai dengan Laporan Bank Umum (LBU) adalah sebagai berikut: kredit konsumsi adalah pemberian kredit untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Misalnya: Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Multiguna, Kredit Pegawai dan Pensiunan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

Suyatno (1990) mengemukakan bahwa peluncuran kredit oleh suatu bank mestilah dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu

hutang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Rahardja (2001) mengemukakan bahwa tujuan diadakannya penilaian kredit adalah agar kredit yang akan diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Keamanan kredit (*safety*), artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menguntungkan (*profitable*), baik bagi bank sendiri berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha.

Penilaian kredit yang demikian dikemukakan Rahardja (2001) hanya mungkin dilakukan apabila tersedia informasi dan data yang cukup. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kegiatan pemberian kredit dalam praktek perbankan menurut Kasmir dengan melakukan analisis dengan 5C, terdiri dari:

1. *Character* (Watak), yaitu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-banar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, yang semuanya merupakan ukuran kemauan membayar.
2. *Capacity* (Kemampuan), dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dalam kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital* (Modal), Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. *Colleteral* (Jaminan atau Agunan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti

keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian), dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

Selain memperhatikan hal-hal di atas, Fuadi (1996) mengemukakan bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya. Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5C, juga menerapkan prinsip 7P, antara lain:

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* (Para Pihak), para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu bank sebagai pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap debitur, bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.
3. *Purpose* (Tujuan) yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.
4. *Payment* (Pembayaran) merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diberikan tersebut dapat dibayar

kembali oleh debitur yang bersangkutan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

5. *Profitability* (Perolehan Laba) untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. Bank harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kredit.
6. *Protection* (Perlindungan) tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi.
7. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha debitur dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai *prospect*, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.

Kegiatan pemberian kredit dalam praktek perbankan juga dikemukakan Usman (2003), bahwa selain menggunakan prinsip 5C dan 7P dalam memberikan kredit bank juga harus menerapkan prinsip 3R, terdiri dari:

1. *Returns* (Hasil yang diperoleh) yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur, artinya perolehan hasil tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, dan sebagainya.
2. *Repayment* (Pembayaran Kembali) merupakan kemampuan membayar kembali dari pihak debitur. Kemampuan membayar tersebut harus sesuai dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan.
3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko) merupakan kemampuan debitur untuk menanggung risiko jika terjadi hal diluar antisipasi kedua belah pihak terutama bila dapat menyebabkan kredit

macet, oleh karena itu harus dipertimbangkan mengenai jaminan atau asuransi barang atau kredit apakah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pemberian atau peluncuran kredit mempunyai prinsip-prinsip yang meliputi prinsip kepercayaan, kehati-hatian, waktu, tingkat risiko, prestasi, serta ditambah dengan prinsip 5C yang terdiri dari: *craracter, capacity, capital, collateral, condition or economy*, dan prinsip 7P yang terdiri dari: *personality, party, purpose, payment, profitability, protection, purpose*, juga prinsip 3R yang terdiri dari: *returns, repayment, dan risk bearing ability*. Prinsip-prinsip ini berguna bagi pihak bank dalam memperhitungkan kemampuan pembayaran kredit oleh debitur.

Menurut Faisal (2005) fungsi kredit adalah kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang, meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, salah satu stabilitas ekonomi, menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Tujuan kredit mencakup *scope* yang luas, ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit adalah: *Profitability* (tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga) dan *Safety* (keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti) (Sinungan, 1995).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi

Ryan (2007) mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata

dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya, dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal.

Tinggi rendahnya kredit perbankan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga perbankan. Jika suku bunga turun maka permintaan terhadap kredit meningkat, *ceteris paribus* dan sebaliknya. Kenaikan permintaan kredit perbankan tersebut akan mendorong investasi, khususnya investasi langsung, dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Adanya investasi langsung tersebut, misalnya pendirian pabrik, dapat menimbulkan efek pengganda berupa penyerapan tenaga kerja, permintaan bahan baku, hasil produksi, dan pembayaran pajak. Proses efek pengganda itulah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkatan daerah maupun nasional.

Kajian teoritis di atas, didukung oleh kajian empiris di antaranya dilakukan oleh Rajan dan Zingales (1998). Hasil studi mereka menyatakan bahwa kredit perbankan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pertumbuhan pendapatan perkapita. Baik untuk negara maju maupun negara sedang berkembang.

Di sisi lain, sejumlah pendapat menyatakan bahwa kredit perbankan tidak selalu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Kredit perbankan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika syarat tertentu dapat terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah terwujudnya kualitas modal fisik atau kualitas infrastruktur sudah mencapai tingkat tertentu sehingga mampu mendorong produktivitas dan daya saing di sektor riil (OJK, 2015).

Escrignano dan Han (2015) menemukan bahwa ada dampak yang signifikan dari pertumbuhan kredit pada pertumbuhan ekonomi dengan besarnya dan transmisi saluran dampak kredit pada aktivitas nyata tergantung pada jenis kredit tersebut. Sedangkan Hahm et al. (2009) menjelaskan instrumen makroprudensial sangat efektif untuk mengurangi siklus kredit tetapi kebijakan moneter yang ketat justru tidak efektif untuk mencegah terjadinya penggelembungan kredit.

Syahfitri (2013) dalam rangka pembiayaan kegiatan perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemberian kredit perbankan mempunyai peranan penting. Peranan kredit perbankan di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat berarti penciptaan lapangan kerja, baik melalui perluasan produksi dan kegiatan usaha lainnya maupun melalui pengaruhnya dalam mendorong munculnya unit-unit usaha baru. Selain itu, kredit perbankan dapat diarahkan untuk pemerataan kesempatan berusaha yang antara lain melalui alokasi pemberian kredit menurut prioritas pembangunan dan golongan ekonomi sehingga pada gilirannya dapat memperluas pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam kaitan ini, kebijakan pemerintah yang ditempuh dalam bidang perkreditan diarahkan untuk membiayai sektor-sektor ekonomi yang mempunyai produktivitas tinggi sehingga alokasi dana secara makro dapat dicapai dengan lebih efisien.

Pemberian kredit perbankan yang dibiayai oleh bank sentral, baik dalam bentuk kredit likuiditas maupun kredit langsung, akan menambah jumlah uang primer (*reserve money*) dan memberikan dampak inflatoir. Berkaitan dengan hal itu, pemberian kredit perbankan yang sepenuhnya dibiayai dana masyarakat yang dihimpun melalui perbankan dan

dipergunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif akan mendorong perekonomian tanpa menimbulkan dampak inflatoir. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak inflatoir, sedapat mungkin kredit perbankan dibiayai dari pengerahan dana masyarakat.

Dalam hal ini, kredit digunakan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, dimana kredit sebagai fungsi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan permintaan kredit yang semakin tinggi juga. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan berkembangnya usaha atau kegiatan produksi dari perusahaan (sektor-sektor). Dengan berkembangnya usaha tersebut, maka diperlukan pembiayaan dari kredit perbankan untuk produktivitas dan pengembangan perusahaan tersebut. Namun perlu dilihat apabila kondisi perekonomian kurang bergairah atau tidak stabil maka permintaan kredit juga akan berkurang. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari kredit.

2.2.2 Hubungan Kredit dan Inflasi

Pergerakan yang terjadi dalam nilai uang dalam waktu secara langsung memengaruhi perbedaan antara bank aktif dan pasif dalam hal nilai tukar, suku bunga dan struktur jangka waktu, dan posisi yang mereka miliki. Instrumen dan aset keuangan yang digunakan oleh sektor perbankan rentan terhadap fluktuasi nilai uang atau daya beli yang dimulai oleh inflasi dapat menggambarkan perubahan yang cepat dalam lingkungan yang bersifat fluktuatif. Sementara bank, yang dicirikan sebagai pembentukan reputasi, menciptakan kepercayaan dengan ekuitas yang mereka miliki, inflasi dapat menyebabkan ekuitas mencair (Bilgin dan Kartal, 2009). Namun, ada sejumlah alasan mengapa perkembangan di pasar kredit, khususnya di pasar pinjaman bank, mungkin memainkan peran penting dalam perekonomian.

Misalnya, ada tradisi lama dalam teori ekonomi yang menyelidiki interaksi antara variabel riil dan finansial dan sebagai akibatnya, antara perkembangan kredit dan fluktuasi siklus bisnis. Selain itu, kemajuan terbaru dalam literatur tentang asimetri informasi di pasar kredit telah menekankan pentingnya *credit channel* untuk transmisi kebijakan moneter. Selain itu, beberapa studi telah menemukan bukti empiris tentang hubungan antara pertumbuhan kredit yang berlebihan dan munculnya ketidakselarasan harga aset yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makro. Secara umum, perkembangan kredit bank mungkin mengandung informasi penting tentang keadaan ekonomi, khususnya tentang kekuatan tekanan inflasi (Calza et al., 2006).

Tingkat inflasi yang lebih tinggi dapat menekan permintaan terhadap deposito bank, yang menyebabkan bank membatasi pasokan kredit dan dengan demikian mendorong penurunan pengeluaran (Kamin dan Roger, 2000). Inflasi yang tinggi memiliki efek buruk pada kinerja ekonomi baik dengan menciptakan distorsi, memberi peluang aktivitas mencari rente, atau dengan meningkatkan risiko premia, orang akan mengharapkan kemandirian bank sentral untuk meningkatkan kinerja ekonomi (Alesina dan Summers, 1993). Inflasi yang lebih tinggi menyiratkan aktivitas keuangan jangka panjang yang lebih sedikit dan lesu. Dalam ekonomi dengan inflasi yang tinggi, perantara akan meminjamkan lebih sedikit dan mengalokasikan modal kurang efektif, dan ekuitas pasar akan lebih kecil dan kurang likuid (Boyd dkk, 2001).

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu wilayah dapat diperoleh dengan mengukur dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang kita kenal dengan konsep Produk Domestik Bruto (PDB)

sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDB, yang dihitung adalah nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur.

Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan, perkembangan barang manufaktur, yang semua hal tersebut akan menunjang menurunnya angka tingkat pengangguran.

Salah satu aspek untuk melihat kinerja perekonomian adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan pekerjaan merupakan *concern* dari pembuat kebijakan. Angkatan kerja merupakan jumlah total dari pekerja dan pengangguran, sedangkan pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang menganggur.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin rendah tingkat pengangguran (BI 2006).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi jangka panjang. Di setiap periode masyarakat akan menambah kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi yang berlaku. Dalam setiap periode jumlah tenaga kerja akan bertambah karena ada golongan penduduk yang akan memasuki angkatan kerja (Sukirno, 2000).

Okun menyatakan bahwa untuk setiap 2 persen kemerosotan GNP dari GNP potensialnya, tingkat pengangguran melonjak 1 persen (Samuelson, 2005, Dalam Darman, 2013). Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan produk, sehingga kesempatan kerja naik, maka pengangguran akan turun (Aruan dan Sriyono, 2014). Landasan teoritis dari hubungan yang diselidiki Okun didasarkan pada kenyataan bahwa peningkatan tenaga kerja harus menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Arthur Okun menemukan bahwa tingkat pengangguran menurun pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tinggi, sedangkan tingkat pengangguran meningkat pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan negatif (Soylu, dkk, 2018).

Koefisien Okun merupakan salah satu komponen penting yang dikaji para ekonom dalam menganalisis Hukum Okun untuk beberapa alasan. Pertama, jika tingkat pengangguran merupakan variabel kebijakan, maka koefisien Okun dapat diinterpretasikan sebagai besaran target perekonomian untuk mereduksi tingkat pengangguran. Kedua, peramalan output sering dibuat untuk menyatakan peramalan dari tingkat pengangguran. Ketiga, koefisien Okun sangat berguna untuk mengetahui kapan output berada diatas atau dibawah nilai potensialnya (Sinclair, 2005, dalam Darman, 2013).

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran (Alghofari, 2010, dalam Aruan dan Sriyono, 2014). Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran. Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan pengangguran.

2.2.4 Hubungan Inflasi dan Pengangguran

Inflasi dan pengangguran merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh suatu Negara. Pernyataan tersebut bukan hanya untuk Negara berkembang saja, namun Negara maju-pun kerap mengalami masalah yang sedemikian rupa. Hal ini berarti bahwa inflasi dan pengangguran merupakan masalah makroekonomi bagi setiap Negara.

Beberapa puluh tahun yang lalu A.W. Phillips menguji hubungan antara inflasi dan pengangguran di Inggris. Penelitiannya tersebut menghasilkan hubungan kuat dan stabil antara inflasi dan pengangguran, selama beberapa waktu (Haldane dan Quah 2011). *Trade-off* atau hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran, dimana menurunkan tingkat inflasi maka untuk sementara tingkat pengangguran akan meningkat begitu pula sebaliknya (Maichal, 2012).

Secara teoritis, kebijakan moneter digunakan oleh bank sentral dalam jangka pendek untuk mencapai dua sasaran, yaitu menjaga aktivitas ekonomi tetap tinggi dan mencapai tingkat inflasi yang rendah (Dornbusch, et al, 2008). Fakta empiris menunjukkan bahwa terdapat *trade-off* antara kedua sasaran tersebut, di mana meningkatnya pertumbuhan *output* (atau penurunan tingkat pengangguran) cenderung diikuti oleh meningkatnya tingkat inflasi.

Kurva phillips adalah seperangkat pengamatan empiris yang menunjukkan hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Inti dari kebijakan yang ditempuh selama inflasi yang tinggi adalah kepercayaan pada kurva phillips yang dapat dieksploitasi, yaitu kurva phillips yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk memilih antara pencapaian pengangguran dan sasaran inflasi. Perdebatan Monetaris-Keynesian berubah, pada tingkat yang signifikan, pada masalah apakah korelasi empiris dari kurva phillips mewakili hubungan struktural yang akan memungkinkan pembuat

kebijakan untuk memilih di antara pengejaran dua variabel, dengan konsekuensi yang dapat diprediksi.

Secara khusus, selama periode pemulihan ekonomi dari melalui siklus ketika inflasi turun dan tingkat pengangguran di atas normal dan dengan demikian pengangguran telah menjadi perhatian utama, para pembuat kebijakan berasumsi bahwa kebijakan moneter dapat bersifat ekspansi tanpa memperburuk inflasi. Artinya, kurva phillips yang datar akan memungkinkan pengurangan pengangguran ke tingkat *full employment* dengan sedikit peningkatan inflasi. Setelahnya, dalam tahap lanjut dari pemulihan ekonomi ketika pengurangan pengangguran dan peningkatan inflasi mengubah inflasi menjadi perhatian utama, para pembuat kebijakan berasumsi bahwa kebijakan moneter dapat bersifat membatasi dengan menciptakan peningkatan pengangguran yang moderat dan dapat diterima secara sosial. Yaitu, peningkatan pengangguran yang moderat namun berkelanjutan di atas tingkat ketenagakerjaan penuhnya yang bekerja melalui kurva phillips yang melandai ke bawah akan menurunkan inflasi dengan biaya sosial yang dapat diterima dalam hal pengangguran. Dengan cara yang diberikan oleh rasio pengorbanan yang tercermin dalam kurva phillips, kebijakan moneter dapat merencanakan jumlah pengangguran berlebih yang dibutuhkan selama bertahun-tahun, yang disebut *soft landing* melalui peningkatan pengangguran yang moderat tetapi meningkat di atas tingkat *full employment*.

2.2.5 Hubungan Kredit dan Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Credit channel yang merupakan salah satu saluran transmisi moneter, beroperasi melalui pinjaman yang disediakan oleh sektor perbankan untuk rumah tangga dan perusahaan dan memenuhi salah satu fungsi terpenting

dari sistem keuangan (Han, 2009). Operasi yang tepat dari saluran ini terkait erat dengan tingkat pengembangan sistem keuangan (Gatti et al, 2012). Bank-bank, yang merupakan elemen dari sistem keuangan yang dikembangkan, memungkinkan untuk investasi lebih lanjut dan produksi dengan menyediakan pembiayaan yang mudah dan murah, dan dengan demikian mendukung terciptanya lapangan kerja baru di ekonomi (Bernanke dan Blinder 1992; Pojatina 2008). Naiknya volume kredit sektor perbankan akan meningkatkan investasi dan pengeluaran konsumsi dan karenanya rasio ketenagakerjaan akan meningkat (Lipsey et al, 1994). Pinjaman konsumen yang disediakan oleh sektor perbankan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan mendorong perusahaan untuk produksi lebih lanjut, investasi dan pekerjaan (Pagano dan Pica 2012).

Bank mendukung sektor riil dengan memberikan pinjaman dalam hal investasi, produksi, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja, terutama di masa krisis. Dalam hal ini, ada hubungan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor riil (Castillo 2009).

Kebijakan moneter ekspansif meningkatkan volume pinjaman yang tersedia, sehingga pasokan kredit bank meningkat. Peningkatan pasokan pinjaman menghasilkan peningkatan dalam investasi dan pengeluaran konsumsi perusahaan dan dengan demikian tingkat produksi total perusahaan meningkat, dan peluang kerja baru tercipta (Mishkin 1996). Di sisi lain, peningkatan kredit mikro yang digunakan untuk pembiayaan usaha kecil mengurangi pengangguran (Armendariz dan Jonathan 2005) dan meningkatkan efisiensi dan volume usaha perusahaan kecil (Robinson 2001).

Telah diamati bahwa pengangguran meningkat ketika sektor perbankan gagal beroperasi secara efisien (Ordine dan Rose 2008).

Gangguan di pasar kredit memiliki dampak negatif pada total kegiatan ekonomi dan pekerjaan (Wasmer dan Weil 2004). Misalnya, bahwa di balik tingkat pengangguran yang tinggi di Rusia pada tahun 2002, ada krisis keuangan tahun 1998 dan penyempitan volume kredit berikutnya (Lakstutiene et al. 2011). Demikian pula, ditentukan bahwa masalah di pasar kredit di negara-negara Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat mempengaruhi total kegiatan ekonomi dan tingkat pekerjaan (Acemoglu 2011).

2.2.6 Hubungan Kredit dan Pengangguran

Hubungan antara akses ke kredit dan pengangguran telah dikaji secara luas dalam literatur teoritis dan empiris. Pertama-tama, terdapat saluran transmisi tidak langsung yang berkaitan dengan faktor penentu keuangan dari permintaan modal dan sensitivitas investasi terhadap arus kas. Dalam *New Keynesian Views*, asimetri informasi antara pemberi pinjaman dan peminjam dianalisis sebagai ketidaksempurnaan pasar yang mengakibatkan penjangkauan kredit dan kontraksi investasi (Stiglitz dan Weiss 1981). Menggunakan data beberapa perusahaan Amerika, Fazzari et al (1988) memperkirakan model investasi empiris. Mereka menguji apakah keputusan investasi bergantung pada ketersediaan dana internal dan apakah sensitivitas ini lebih tinggi untuk perusahaan asimetri informasi yang tinggi. Mereka mengkonfirmasi adanya kendala keuangan, terutama untuk perusahaan dengan dividen rendah. Literatur empiris yang besar kemudian berkembang sejalan dengan pendekatan ini. Sayangnya, tidak satu pun dari studi ini yang meneliti pengaruh fluktuasi investasi terhadap permintaan tenaga kerja dan kinerja pekerjaan.

Untaian literatur kedua membahas secara lebih eksplisit masalah ketenagakerjaan. Pertama-tama, keuangan secara langsung mempengaruhi

lapangan kerja melalui dampaknya pada pendirian perusahaan baru. Menurut Acemoglu (2001), penciptaan lapangan kerja terutama terjadi pada perusahaan yang berinovasi. Mengurangi akses kredit bagi pengusaha mencegah munculnya perusahaan baru dan memberi hukuman pada pekerjaan. Belke dan Fehn (2002), Fehn dan Fuchs (2003) dan Belke et al (2004) fokus pada modal ventura sebagai sumber keuangan yang tepat untuk perusahaan yang berinovasi. Studi teoritis dan empiris mereka mengungkapkan bahwa pengembangan modal ventura yang tidak mencukupi menghalangi pendirian perusahaan baru, sehingga merugikan lapangan kerja.

Greenwald dan Stiglitz (1993) serta Arnold (2002) menggunakan pendekatan alternatif, yang menghubungkan literatur *New Keynesian* tentang permintaan modal dengan masalah permintaan tenaga kerja. Mereka menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja perusahaan bergantung pada kendala keuangan mereka dan berfluktuasi sesuai dengan posisi neraca mereka. Oleh karena itu, lapangan kerja menurun ketika perusahaan menghadapi tekanan kredit. Hasil teoritis ini telah dikuatkan oleh studi empiris. Sebagai contoh, Sharpe (1994) menemukan bahwa sensitivitas permintaan tenaga kerja perusahaan Amerika terhadap penjualan meningkat dengan rasio leverage mereka. Menggunakan sekumpulan perusahaan Inggris, Nickell dan Wadhvani (1991) menunjukkan bahwa kesempatan kerja menurunkan rasio leverage perusahaan dan meningkat dengan kapitalisasi pasar mereka. Lebih lanjut Nickell dan Nicolitsas (1999) menyimpulkan bahwa lapangan kerja turun dengan rasio pembayaran bunga terhadap arus kas. Benito dan Hernando (2008) mendapatkan hasil yang sama untuk perusahaan Spanyol. Menggunakan data Italia, Caggese dan Cunat (2008) menetapkan

bahwa perusahaan yang menghadapi kendala keuangan yang lebih kuat lebih intensif menggunakan pekerja jangka tetap daripada pekerja tetap.

Akhirnya, makalah terbaru oleh Campello et al (2010) mengusulkan analisis yang mencakup bagaimana kendala keuangan mempengaruhi investasi dan lapangan kerja. Kontribusi mereka semakin menarik karena mereka berkonsentrasi pada periode krisis subprima. Para peneliti mensurvei 1.050 kepala pejabat keuangan di Amerika Serikat, Eropa dan Asia untuk membedakan perusahaan yang dibatasi secara finansial dan non finansial. Studi mereka memberikan bukti bahwa selama krisis (yaitu selama kuartal terakhir tahun 2008), perusahaan-perusahaan Amerika yang dibatasi secara finansial berencana untuk memotong biaya modal tetap mereka dan mengurangi lapangan kerja lebih intensif daripada perusahaan yang tidak dibatasi secara finansial. Selain itu, perbedaan antara reaksi perusahaan yang dibatasi secara finansial dan non finansial jauh lebih besar selama krisis dibandingkan sebelumnya (yaitu dari kuartal ketiga 2007 hingga kuartal terakhir 2008).

2.3 Tinjauan Empiris

Beberapa hasil studi empiris lainnya yang menyelidiki hubungan antara kredit sektor ekonomi prioritas terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi dan inflasi, menemukan hasil yang berbeda-beda. Berikut ini disajikan rincian hasil penelitian yang sejalan:

Tabel 2.1
Tinjauan Empiris

Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
Lee (2000)	<i>Financial Intermediation and Economic Growth</i>	• Pertumbuhan Ekonomi • Pengangguran	<i>Vector Auto Regression</i>	Menunjukkan hasil yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

	<i>Evidence from Canada</i>			Pasar tenaga kerja dan struktur industri di negara-negara maju telah berevolusi dengan cara baru sehingga hubungan antara PDB dan pengangguran menunjukkan hasil yang negatif.
Petkov (2008)	<i>The Labour Market and Output in the UK – Okun's Law Still Stand</i>	• Pertumbuhan Ekonomi • Pengangguran	<i>Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)</i>	Membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan PDB dan pengangguran.
Ordine dan Rose (2008)	<i>Local Banks Efficiency and Employment</i>	• Pinjaman Bank • Lapangan Kerja melalui Credit Channel	<i>System Generalized Method of moments (GGM)</i>	Menemukan hasil bahwa peningkatan 10% dalam pasokan kredit sektor perbankan meningkatkan tingkat ketenagakerjaan sebesar persen
Darman (2014)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran: Analisis Hukum Okun	• Pertumbuhan Ekonomi • Pengangguran	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Okun berlaku di Indonesia, di mana koefisien okun bernilai negatif, tingkat pengangguran turun seiring dengan dicapainya pertumbuhan ekonomi
Erdal Gulistan	<i>The Analysis of The Relationship</i>	• Pengangguran • Inflasi	<i>Vector Autoregress</i>	Menurut hasil, terdapat hubungan negatif antara

(2014)	<i>between Unemployment and Inflation in Turkey by VAR Model</i>		<i>ive Model</i>	pengangguran dan inflasi. Hasil ini mendukung kurva Philips. Kesimpulan ini menyatakan pentingnya target inflasi yang optimal dan karenanya memperoleh tingkat pengangguran alami.
Indriyani (2016)	Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	• Inflasi • Suku Bunga • Pertumbuhan Ekonomi	<i>Multiple Linier Regression</i>	Terdapat hubungan antara pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005-2015. Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005-2015 atas inflasi dan suku bunga memiliki hubungan yang kuat, sedangkan inflasi dengan suku bunga memiliki hubungan yang lemah. Inflasi dan suku bunga berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2005-2015. Secara parsial inflasi dan suku bunga

				berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005-2015.
Mangasa Agustinus Sipahutar	Effect of Credit on Economic Growth, Unemployment and Poverty	• <i>Bank Credit</i> • <i>Economic Growth</i> • <i>Unemployment Rate</i> • <i>Poverty</i>	<i>VAR ECM</i>	Penelitian ini mengungkapkan kausalitas dua arah antara kredit bank dan pertumbuhan ekonomi. Kredit bank mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kedalaman kredit dan perkembangan keuangan. Selain itu, kredit bank mengalami percepatan pertumbuhan faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kredit bank adalah pertumbuhan endogen dan prediktor yang baik tentang perekonomian Indonesia. Model estimasi kami menjelaskan bahwa kredit yang dialokasikan oleh bank meningkat Eskalasi bisnis ke sektor riil kemudian mendorong pertumbuhan

				ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan permintaan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan kemudian mengurangi kemiskinan. Ini secara keseluruhan. Mekanisme transmisi hanya terjadi melalui adanya kredit bank dengan meningkatkan jumlah uang beredar ke sektor riil, mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan sosial.
--	--	--	--	---

Perbedaan antara studi empiris dengan penelitian ini adalah para peneliti sebelumnya yang kebanyakan mereka meneliti variabel secara terpisah, pada penelitian ini menggabungkan beberapa variabel dalam penelitian sebelumnya, sehingga terbentuk hubungan antara penyaluran kredit produktif sektor ekonomi prioritas dan kredit konsumtif terhadap pengangguran baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Sulawesi Selatan. Selain itu *series* yang digunakan juga lebih terupdate bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu tahun

2010-2018 menggunakan data triwulanan yang lebih mencerminkan kondisi kekinian.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa alasan mengapa pemfokusan kepada institusi perbankan menjadi penting. Yang paling mendasar adalah peran perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu dalam memobilisasi simpanan (giro, tabungan, deposito) dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk pembiayaan perekonomian (Warjiyo dan Juhro, 2016). Dalam literatur yang terkait teori keuangan dan pertumbuhan, dimana perbankan mendorong perekonomian melalui sebuah konsep yang disebut sebagai transformasi likuiditas sebagaimana yang dikembangkan pertama kali oleh Diamond dan Dybvig (1983). Salah satu produk perbankan adalah kredit, kredit memiliki peranan penting dalam pembiayaan nasional dan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan kredit memungkinkan rumah tangga dalam melakukan konsumsi dan perusahaan melakukan investasi yang tentu tidak bisa dilakukan dengan dana sendiri, sehingga pengucuran kredit menjadi kunci.

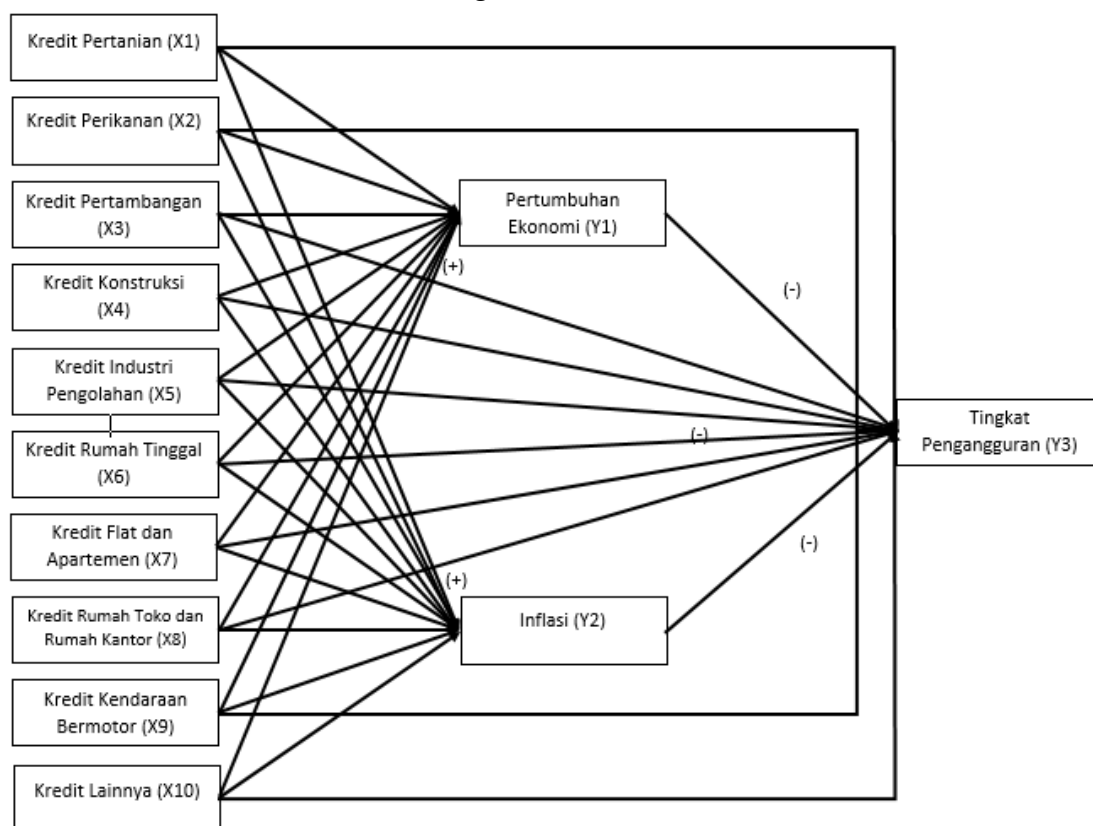
Kredit perbankan yang dikucurkan juga menyentuh berbagai sektor ekonomi. Sehingga pengucuran kredit pada sektor-sektor ekonomi tentu akan memberi efek terhadap sektor tersebut berkaitan dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah menetapkan lima sektor ekonomi prioritas yang menjadi tulang punggung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, kelima sektor ekonomi prioritas tersebut yaitu, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor konstruksi yang mewakili sektor infrastruktur dan sektor industri pengolahan yang mewakili produk berorientasi ekspor.

Kredit perbankan yang disalurkan, selain menjadikan perekonomian lebih bergairah dan menggeliat, di satu sisi berdasarkan literatur, pertumbuhan kredit yang berlebihan dapat mengancam kestabilan ekonomi makro. Kredit konsumtif adalah jenis kredit perbankan yang paling berpengaruh besar terhadap terjadinya inflasi. Kredit konsumtif diakui merupakan fasilitas yang memberikan nasabah kemudahan untuk memperoleh sesuatu, seperti mobil, motor, rumah dan berbagai barang konsumsi. Fasilitas pembiayaan ini murni atas dasar tingkat penghasilan debitur dan analisisnya sangat sederhana karena hanya berdasarkan *repayment capacity* yang bersumber dari penghasilan debitur. Semakin besar *repayment capacity* seorang debitur maka semakin besar pula fasilitas kredit konsumtif yang dapat diterimanya. Perbankan lebih tertarik menyalurkan kredit konsumtif karena cenderung lebih aman. Muliaman (2004) menambahkan bahwa salah satu faktor yang mendorong perkembangan konsumsi adalah kredit untuk tujuan konsumsi yang cenderung meningkat dalam periode yang sama. Peningkatan kredit dapat memicu pertumbuhan permintaan agregat di atas output potensial yang mengakibatkan perekonomian akan memanas, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan inflasi. Inflasi yang tinggi dan tidak terkontrol dalam jangka panjang merupakan fenomena moneter (Friedman, 1963) yang ada di setiap negara sebagai indikator penting dalam perekonomian. Inflasi selalu menjadi salah satu topik yang banyak digunakan dalam penelitian makroekonomi, hal ini dikarenakan inflasi memiliki implikasi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Ayyoub, 2011), serta tingkat inflasi juga dapat memberikan gambaran mengenai status ekonomi suatu negara (Amir dan Karamat, 2011).

Ketika pertumbuhan ekonomi membaik, maka akan berefek pada penurunan angka tingkat pengangguran, hal ini sesuai dengan yang dituliskan Putong (2013) bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 2,5 persen di atas trennya yang telah dicapai pada tahun tertentu, tingkat pengangguran akan turun sebesar 1 persen.

Secara skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada **Gambar 3.1**

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran



3.2 Hipotesis

Berdasarkan *review* teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga kredit produktif sektor ekonomi prioritas (sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor konstruksi dan sektor industri

pengolahan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Diduga kredit produktif sektor ekonomi prioritas (sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.
3. Diduga kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Diduga kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.
5. Diduga kredit produktif sektor ekonomi prioritas (sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.
6. Diduga kredit produktif sektor ekonomi prioritas (sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui inflasi.
7. Diduga kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.
8. Diduga kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui inflasi.

9. Diduga kredit produktif sektor ekonomi prioritas (sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.
10. Diduga kredit konsumtif (rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko dan rumah kantor, kendaraan bermotor dan lainnya) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.